



► JAMINAN KESEHATAN

27.312 Warga Jogja Tunggak Iuran BPJS

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja menjamin biaya kesehatan semua warga Jogja kategori miskin maupun mampu.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Hal ini terkait masih banyaknya peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jogja tunggakan warga Jogja sebagai peserta mandiri per Januari 2018 sebanyak 27.312 jiwa, dengan nilai tunggakan Rp12,3 miliar. Tunggakan tersebut terdiri dari peserta kelas satu sebanyak 9.795 jiwa atau Rp7,19 miliar, kelas dua 7.180 jiwa Rp3 miliar.

Peserta mandiri kelas tiga pun menunggak sebanyak 10.337 jiwa dengan nilai Rp2,093 miliar. Tunggakan ini mencapai 36,98% dari total peserta mandiri BPJS sebanyak 73.886 jiwa. "Ini ironis karena jika dilihat dari jumlah kepesertaan, yang menunggak terbanyak adalah kelas tiga. Tapi secara nominal tunggakan terbanyak kelas satu," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki

- Tunggakan tersebut terdiri dari peserta kelas satu sebanyak 9.795 jiwa atau Rp7,19 miliar, kelas dua 7.180 jiwa Rp3 miliar.
- Pemerintah Kota Jogja perlu menuntaskan persoalan tunggakan tersebut.

Ardiyanto, Jumat (26/1).

Fokki mengatakan Pemerintah Kota Jogja perlu menuntaskan persoalan tunggakan tersebut sebelum integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke JKN BPJS pada 2019. Pihaknya menyarankan Pemerintah Kota Jogja menawarkan kepada semua peserta mandiri yang bersedia di kelas tiga dibiayai dari APBD Kota Jogja agar tunggakan tidak semakin besar.

Menurut Fokki, APBD Kota Jogja tidak akan terbebani untuk menanggung iuran semua peserta BPJS mandiri, "Karena ini merupakan hak dasar masyarakat," kata dia.

Komisi D berencana membahas kembali persoalan tersebut dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Jogja pada Februari. Ia berharap Pemerintah Kota Jogja bisa menganggarkan tanggungan iuran semua peserta BPJS mandiri kelas tiga di APBD Murni 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Fita Yulia Kisworini mengatakan segera menelusuri data peserta mandiri yang menunggak iuran BPJS, khususnya kelas tiga untuk mengetahui apakah peserta tersebut masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau bukan.

Terkait dengan usulan Dewan, Fita mengaku masih perlu dibahas lebih lanjut. Sebab, kata dia, sesuai ketentuan, peserta BPJS kelas tiga yang ditanggung pemerintah tidak bisa naik kelas.

Total kepesertaan BPJS warga Jogja kategori mandiri dan bantuan iuran dari APBN atau PBI sampai saat ini sebanyak 393.951 jiwa. Dari jumlah tersebut, 111.228 jiwa di antaranya peserta PBI (bantuan iuran) dari APBN dan PBI APBD 28.604 jiwa. Sisanya peserta bantuan perusahaan swasta dan instansi, serta peserta mandiri.

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Jogja, Luhur Budiman mengatakan tunggakan kepesertaan BPJS mandiri itu terakumulasi sejak 2014. Namun sesuai Peraturan Presiden No.19/2016 maka tunggakan yang dihitung maksimal 12 bulan, meski menunggak lebih dari setahun.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005